

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016  
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN  
GURU KELAS SD**

**BAB I**

**KEDUDUKAN PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN  
SIKAP DAN PERILAKU POSITIF DALAM PEMBELAJARAN PKn**



**Dra.Hj.Rosdiah Salam, M.Pd.**

**Dra. Nurfaizah, M.Hum.**

**Drs. Latri S, S.Pd., M.Pd.**

**Prof.Dr.H. Pattabundu, M.Ed.**

**Widya Karmila Sari Achmad, S.Pd., M.Pd.**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**2016**

## BAB I

### KEDUDUKAN PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN SIKAP DAN PERILAKU POSITIF DALAM PEMBELAJARAN PKn

#### A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 1, Anda diharapkan dapat menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 1 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia
2. Menganalisis sikap positif yang perlu dikembangkan dalam konteks pembelajaran PKn.
3. Menerapkan sikap-sikap positif yang perlu dikembangkan melalui PKn.
4. Menunjukkan/menampilkan perilaku positif yang harus dikembangkan sesuai tuntutan pembelajaran PKn.

#### B. Uraian Materi

##### 1. Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Pancasila bagi bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar Negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini pembahasan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia:

##### a. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumpulan pemikiran para pendiri negara (*The Founding Fathers*) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*weltanschauung*' atau pandangan hidup (Safroedin dkk:1995).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno bahwa dalam mengadakan Negara Indonesia merdeka itu *“harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini.”*

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

#### **b. Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa biasa juga disebut dengan ideologi Negara. Pancasila sebagai ideologi Negara yakni dimana Pancasila memiliki nilai-nilai sarat (penuh) dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (cita-cita nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea II). Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi nasional, berarti nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Ideologi sifatnya terbuka, maksudnya adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Dimensi realistik, harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnis, dan multi religius. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khazanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, tetapi sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan dan perselisihan.

Melihat situasi demikian, masalah yang perlu diatasi adalah bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengawal penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, *nation and character buildings* merupakan prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ini Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi persatuan. Pancasila sebagai ideologi persatuan, merupakan ideologi yang mampu memberikan jaminan persatuan untuk memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik.

Penampilan Pancasila sebagai ideologi persatuan atau pemersatu telah menunjukkan relevansi dan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan dan penyelenggaraan negara RI. Rakyat Indonesia telah dibangun dengan kesadaran kuat sebagai bangsa yang memiliki identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme.

### **c. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding fathers* Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri (*Volkgeist*) nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia.

### **d. Pancasila Sebagai Sistem Etika**

Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Etika Pancasila membahas tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok

dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai yang kelima adalah keadilan. nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak.

Mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.

## **2. Pembelajaran Demokratis dan cinta lingkungan sebagai Sikap dan perilaku positif dalam PKn**

Sejalan dengan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, maka menuntut pula proses belajar mengajarnya dilakukan secara demokratis. Dalam hal tujuan, PKn di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyimak hal di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengembang misi sebagai pendidikan politik demokrasi dalam rangka membentuk warga Negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan Negara. Untuk mencapai maksud tersebut idealnya PKn tidak hanya mengajarkan tentang apa itu demokrasi, tetapi belajar dalam suasana demokratis, dan membelajarkan siswa agar mampu membangun peradaban demokrasi. Dalam pembelajaran demokratis, pembuatan keputusan atau sikap dan perilaku dilakukan melalui proses dialogis, argumentasi, negosiasi dimana siswa memiliki partisipasi dan hak-hak yang sama. Siswa sebagai subjek belajar dapat memaksimalkan inisiatif, pemikiran, gagasan,

ide, kreativitas dan karya. Secara singkat pembelajaran demokratis merupakan proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi (Diknas, 2004), yaitu Penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan dan menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman siswa.

Selain sikap dan perilaku demokratis, perlu pula dikembangkan sikap dan perilaku cinta lingkungan. Sikap yang perlu kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah Tidak membuang sampah sembarangan, Menanam kembali hutan yang gundul(reboisasi), Mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari (misalnya penggunaan sabun detergen, pemanfaatan zat pewarna alami), Melakukan tebang pilih, Akibat jika tidak melestarikan lingkungan adalah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan bumi.

Kita sebagai warga negara yang baik hendaknya turut berpartisipasi dalam menekan dan menanggulangi masalah tersebut dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita terlebih dahulu misalnya dengan melakukan penanaman pohon kembali sebagai salah satu cara yang bisa memperbaiki paru-paru bumi. Selain itu meminimalkan penggunaan kertas, karena semakin banyak kertas yang digunakan maka semakin banyak pula pohon yang ditebang.